

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amsari Feri, dkk, 2020, *Pembaruan Partai Politik di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.
- Asshiddiqie Jimly, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Tangerang Selatan: UNPAM PRES.*
- Failaq Fayasi, 2022, *Rasionalitas Pengecualian Presidential Threshold Bagi Partai Baru*,kompasiana.
- Ghafur Jamaludin dan wardhana,2019, *Presidential threshold*, Malang: Setara Press.
- Hr Ridwan, 2016, *Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- In'amul Mustofa, dkk. 2016, *Konsep Memperdalam Demokrasi*, Malang: Intrans publishing.
- Miriam Budiarjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Pt. refika aditama.
- Raharjo Satjipto, 2009, *Hukum Proresif*, Yogyakarta Genta Publishing.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, Malang: Setara Pres.
- So Woong Kim, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

E- Book

Adnan Indra Muchlis, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Trussmedia Grafika.

Fajlurahman Jurdi, 2020, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Jakarta: Kencana.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universitas Press.

Saihu Muhammad, dkk, 2015, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, Jakarta: Dkpp Ri.

Santosa Lukman, 2016, *Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta: Po PREES.

Jurnal

Asep Wijaya, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, Risalah Hukum, Juni 2020.

Muchtarrija, *Infektifitas Pengaturan Presidential Treshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, volume 24, JH Ius Quia Iustum, 2018.

Syaiful M, 2022, *Antinomi Penerapan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Presiden Dalam Sistem Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*. Jurnal Litigasi Amsir, volume 10, No 1.

Radita Adji, 2016, *Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*. Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar negara republik indonesia 1945 Pasal 6 A Ayat 2.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Pasal Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah ke dalam

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 43 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan MK Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013 Perkara Pengujian UU No. 42

Tahun 2008 Tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian

Pasal 9, Pasal 3 Ayat (5), Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 Tentang Pemilihan Umum presiden Dan Wakil Presiden